

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIT KERJA :
KELAUTAN DAN PERIKANAN**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ARHAM RUMPA
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 1000530

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 530.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/96 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah Seluas 1.400 m2 di KAB / KOTA KONAWE, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah Seluas 140 m2 di KAB / KOTA KENDARI, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 90.000.000

1. MOBIL, WULLING CONFERO 1.5 DB Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.148.054**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 621.148.054**III. HUTANG** Rp. 265.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 356.148.054**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.